

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan sangat luas wilayahnya. Terdiri dari 34 provinsi dan belasan ribu pulau yang di dalamnya yang memiliki berbagai macam potensi. Untuk itu pemerintah harus bekerja keras mengembangkan keanekaragaman yang ada di Indonesia agar beragam potensi yang ada dapat bermanfaat bagi negara maupun masyarakat. Dengan perbedaan potensi dan kondisi setiap wilayah yang membuat pemerintah juga turut membedakan perlakuannya kepada setiap wilayah. Perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali menyebabkan adanya ketidakmerataan pembangunan di setiap wilayah di Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia yang sangat besar dan adanya keragaman geografis membuat banyaknya daerah sulit di akses untuk kegiatan pembangunan.

Pembangunan umumnya diartikan sebagai perbaikan infrastruktur ataupun fasilitas publik lainnya. Namun, secara luas dengan adanya pembangunan di sebuah daerah merupakan suatu bentuk usaha untuk memanusiaikan manusia dengan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan sebagai warga negara. Tetapi, kenyataannya di Indonesia pembangunan di setiap wilayah masih saja menjadi masalah yang seperti tiada akhirnya. Ketimpangan pembangunan di Indonesia

masih menjadi suatu problematika yang masih pemerintah terus coba minimaslr dengan berbagi cara.

Todaro & Smith (2010) mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan proses meningkatkan kualitas semua kehidupan dan kemampuan manusia dengan meningkatkan level orang hidup, harga diri, dan kebebasan. Pembangunan dasarnya adalah sebuah upaya untuk memperbaiki kesejahteraan seluruh warga negara. Disparitas pembangunan yang terjadi antar daerah menjadi faktor penghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan di Indonesia terjadi umumnya di wilayah perdesaan dan perkotaan, pulau Jawa dan luar pulau Jawa, serta kawasan Indonesia bagian timur dan kawasan Indonesia bagian barat (Bappenas, 2016). Kondisi ketimpangan wilayah yang terus berlangsung tentu saja akan berdampak pada stabilitas perekonomian suatu wilayah yang terdampak. Jika pemerintah terlalu memfokuskan sebuah pembangunan hanya dalam satu wilayah tertentu saja akan menyebabkan sedikit banyak impikasi pada wilayah lain seperti kecemburuan antarwilayah.

Mewujudkan negara yang sejahtera tentunya menjadi harapan bagi seluruh bangsa di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dalam membentuk negara yang sejahtera, Indonesia melalui Bappenas telah merancang visi-misi Indonesia untuk tahun 2045 yang terdiri dari empat pilar, antara lain: pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dalam visi-misi tersebut Bappenas telah menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus terus digencarkan sebagai upaya mempersempit

jarak kesenjangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pemerataan pembangunan daerah di seluruh wilayah di Indonesia (Bappenas, 2019). Visi misi Indonesia 2045 juga sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) pada alinea keempat yang berbunyi “*..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”. Hal ini membuktikan bahwa sejak negara ini terbentuk pemerintah menjanjikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan keadilan untuk seluruh warga negara agar dapat hidup dengan nyaman karena sesungguhnya pembangunan merupakan kegiatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

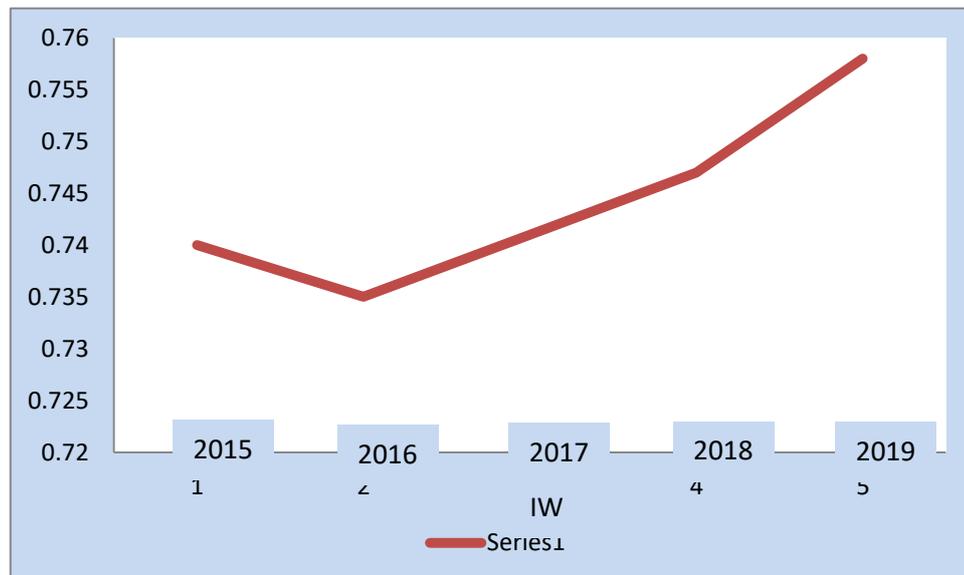
Lessmann (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketimpangan dapat ditanggulangi dengan cara menginvestigasikan berbagai faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui berapa aspek yang perlu ditinjau ulang baik secara empiris dan juga teori. Permasalahan terkait ketimpangan pembangunan tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga sebagai agenda pemerintah daerah yang lebih dekat dengan keadaan daerah tersebut. Ketimpangan di suatu daerah merupakan hal yang umum dan alamiah terjadi. Sjafrizal (2012) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Faktor-faktor tersebut antara

lain: 1) tidak samanya sumber daya alam setiap wilayah, 2) kondisi demografis seperti tenaga kerja, 3) alokasi dana yang bertujuan untuk pembangunan seperti investasi pemerintah maupun asing, 4) terpusatnya kegiatan ekonomi pada suatu wilayah, 5) mobilitas barang dan jasa. Perbedaan faktor-faktor di atas di setiap wilayah menyebabkan proses pembangunan wilayah berbeda sehingga terjadinya ketimpangan secara natural terjadi dan terbentuklah wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal (Dhyatmika & Atmanti, 2013a).

Ketimpangan yang timbul di berbagai wilayah pada akhirnya akan berdampak pada berbagai bidang baik sosial, politik, maupun ekonomi. Ketimpangan pembangunan wilayah berdampak pada stabilitas perputaran roda perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu poros menyebabkan daerah lain menjadi tertinggal. Daerah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga keadaan daerah tersebut lebih sejahtera. Sedangkan daerah yang tertinggal, tidak mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga tingkat kesejahteraannya jauh dibawah daerah sebelumnya (Tambunan, 2001).

Sudah tidak asing lagi bahwa di Indonesia seluruh kegiatan baik bidang ekonomi maupun pembangunan lebih terfokus pada Pulau Jawa . Pembangunan-pembangunan di luar pulau Jawa seakan tidak terlalu menjadi prioritas pemerintah, terlebih jika mengingat angka ketimpangan yang masih tinggi di luar Pulau Jawa. Terkonsentrasinya pembangunan pemerintah pada pulau Jawa sangat terlihat jelas. Hal ini dibuktikan bahwa adanya ketimpangan pembangunan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan dapat terlihat tingginya nilai dari indeks Williamson berikut ini.



Sumber: BPS

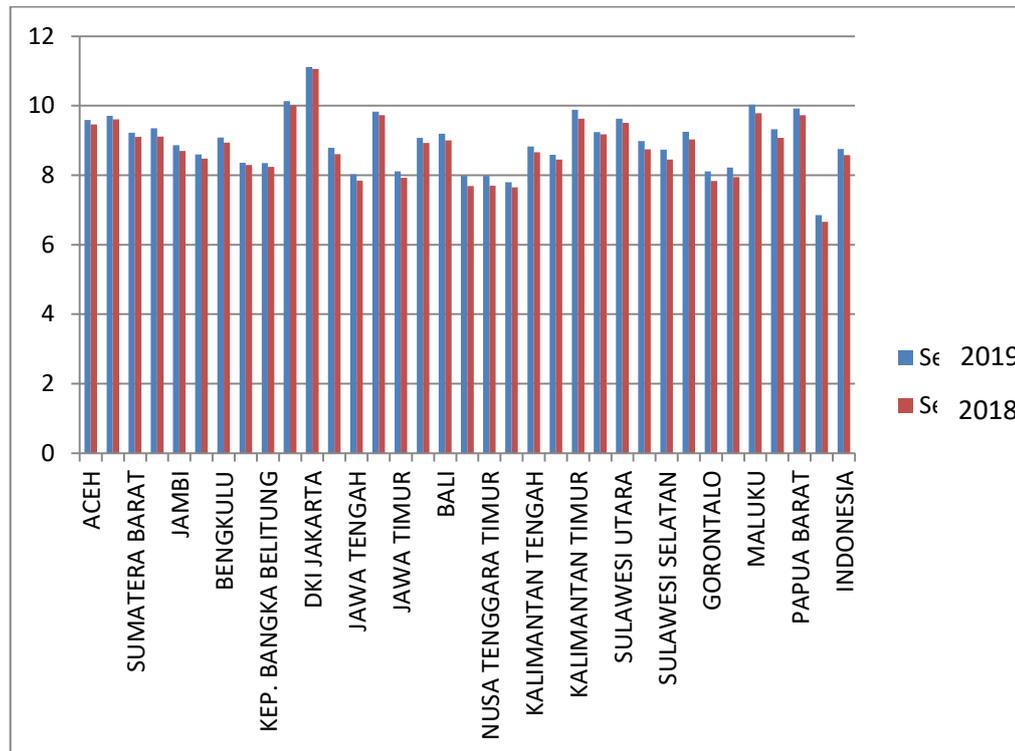
Gambar 1.1
Indeks Williamson Indonesia

Terlihat data ketimpangan pembangunan dengan menggunakan indeks Williamson di wilayah Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan di provinsi provinsi tersebut memiliki rata-rata indeks yang tinggi lima tahun terakhir. Dan selama 5 tahun terakhir ketimpangan di Indonesia cenderung meningkat, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.

Pembangunan wilayah-wilayah yang tertinggal merupakan suatu proses mengubah satu wilayah dengan cara memanfaatkan berbagai jenis sumber daya yang ada di wilayah tersebut (Aprianoor & Muktiali 2015). Maka demi tercapainya pembangunan wilayah-wilayah tertinggal salah satu sumber daya yang perlu ditingkatkan adalah pembangunan sumber daya manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (2019) melakukan pembangunan manusia adalah suatu proses pembangunan dengan tujuan agar masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia dapat terlihat dari tiga dimensi yakni kesehatan, pendidikan, serta pendapatan per kapita (United Nations Development Programme, 1990).

Selaras dengan pernyataan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda, Muluk, & Prasetyo (2013) pun menyetujui bahwa adapun kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat pula meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga pembangunan antar wilayah dapat berkurang.

Pendidikan pada beberapa provinsi di Indonesia yang di dasari dengan rata-rata lama sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya. Terlihat dari grafik di bawah ini yang digambarkan pada tahun 2018-2019.

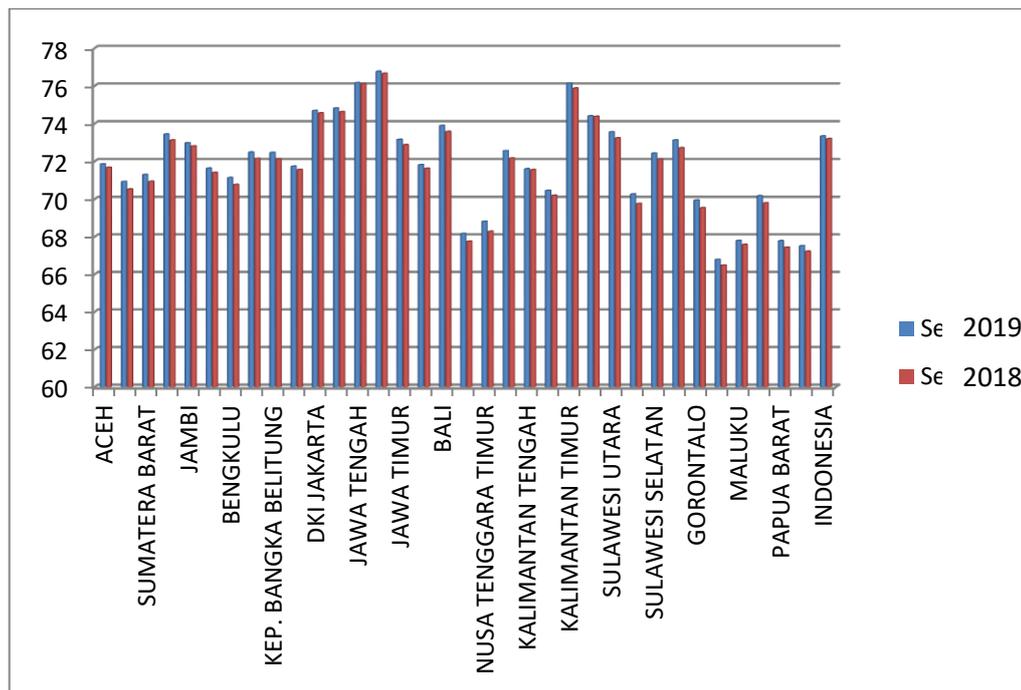


Sumber: BPS

Gambar 1.2

Rata-Rata Lama Sekolah Indoensia 2018-2019

Selain dari sektor pendidikan, mengupayakan penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat juga melalui perbaikan sektor kesehatan yang dilihat angka harapan hidup (AHH). Berikut merupakan angka harapan hidup di Indonesia



Sumber: BPS

Gambar 1.3

Angka Harapan Hidup Indoensia 2018-2019

Angka Harapan Hidup di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun angka harapan hidup Indonesia masih dibawah standar WHO yakni berusia 72 tahun. Banyak sekali provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki angka harapan hidup dibawah 70 tahun. Hal ini mengartikan bahwa kesehatan Indonesia masih di bawah standar rata-rata tingkat kesehatan dunia.

Pemerataan pembangunan wilayah melalui pendidikan haruslah segera ditangani, karena melalui pendidikan masyarakat dapat menggali pengetahuan dan teknologi, keterampilan, inovasi, dan pola pikir. Atmanti (2005) menyebutkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai *human being* atau dengan kata lain

pendidikan mampu meningkatkan kehidupan manusia ke bagian selanjutnya antara lain kompetitif dan employability.

Pendidikan dan kesehatan adalah sebuah investasi jangka panjang untuk menuai hasil yang menjanjikan di masa depan. Baik buruknya kualitas sumber daya manusia tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan, apabila angka pendidikan dan kesehatan cenderung rendah maka pemerataan pembangunan di suatu wilayah akan sangat sulit

Selain meningkatkan pendidikan dan kesehatan, kemudahan dalam mengakses suatu wilayah juga dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah. Membangun infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah menjadi penting karena tersedianya infrastruktur menjadi penunjang dalam kegiatan bermasyarakat. Tersedianya infrastuktur seperti jalan dengan kondisi yang layak turut mempermudah pergerakan manusia dan barang. Dalam upaya meningkatkan bidang pendidikan dan kesehatan dapat terlaksana apabila infrastruktur yang ada mudah dijangkau atau memiliki aksestabilitas yang tinggi. (Mopangga, 2011).

Melalui peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi masalah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas penelitian tentang “Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pendidikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia?
2. Apakah terdapat kesehatan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara infrastruktur terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap agar dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat memperkecil angka ketimpangan wilayah khususnya di Indonesia. Selain itu, peneliti juga berharap agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang kelak akan berguna di masa depan.

2. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Diharapkan penelitian ini mampu berguna sebagai bahan literatur yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan infratraktur serta ketimpangan pembangunan ekonomi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memperluas informasi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan infratraktur serta ketimpangan pembangunan ekonomi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat pemerintah gunakan sebagai bahan rujukan dalam upaya pengatasan ketimpangan pembangunan di Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil akan tepat sasaran dan memperkecil ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut.

D. Kebaharuan Penelitian

Masih sedikitnya penelitian yang membahas mengenai ketimpangan pembangunan yang dikaitkan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Selain itu, sangat sedikit penelitian yang membahas mengenai ketimpangan pembangunan di Indonesia. Kebanyakan penelitian lebih difokuskan perprovinsi saja. Oleh karena itu terdapat kebaharuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

sebelumnya. Penelitian menggunakan populasi sebanyak 34 provinsi selama empat tahun terakhir yakni 2017-2019. Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan DJPK.